

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU

Masditou

Dosen POLTEKPAR Medan E-mail: masadit410@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Kata kunci: *Manajemen Pembiayaan, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tecantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan Sumber Daya Manusia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan

¹ Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan No. 20 tahun 2003 *tentang sistem pendidikan Nasional*, (Jakarta: DEPAG, 2006), h. 34.

pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara formal maupaun informal. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadi lebih bermoral dan mengetahui yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pendidikan sebenarnya adalah hak semua manusia, tidak peduli dia miskin atau kaya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua manusia yang diikuti dengan kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Akan tetapi dalam kenyataanya, dunia pendidikan di indonesia masih memiliki beberpa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, pengelola madrasah dan oleh masyarakat agar mutu pendidikan di indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini dijadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Diantara standar yang menjadi acuan ialah:

Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Proses penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam hal kognitif, afektif, psikomotorik.

Standar Isi. Merupakan cakupan sekumpulan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Meliputi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Standar Proses. Ialah proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan. Artinya segala kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas, biasa disebut sebagai kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Baik dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Hal semua itu harus di susun serapih mungkin, agar proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas dapat berjalan dengan baik.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seorang pendidik yang terdapat disuatu instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik. Pengembangan kompetensi bisa berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidik dan tenaga kependidikan

berkompetensi dalam bidangnya, mudah dalam mengatasi segala problematika yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkup lembaga pendidikan.

Standar Sarana dan Prasarana. Karakteristik institusi pendidikan yang berkualitas ialah dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik. Mencakup ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dalam keadaan baik. Artinya semua berfungsi seutuhnya.

Standar Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi pada tiga hal a) biaya satuan pendidikan b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan c) biaya pribadi peserta didik.

Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya yaitu melalui standar pembiayaan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting, yang masuk dalam kategori delapan standar pendidikan pemerintah.

Manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan yang secara singkat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan madrasah/sekolah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan /keuangan.

Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.²

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab

² E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 193.

IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadair serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik.

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran penting atas berjalannya proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan memadai akan berakibat pada berlangsungnya pembelajaran yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Tarmizi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie”, yang menyebutkan bahwa pengawasan yang rendah terhadap penggunaan pendidikan akan mengakibatkan sumber-sumber biaya pendidikan yang diperoleh belum memberikan dampak yang optimal. Karena pemanfaatan biaya yang kurang tepat dengan tidak memberikan prioritas bagi faktor-faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi.³

Sebaliknya, tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. “Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain”.⁴ Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, terutama di madrasah/sekolah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah/sekolah diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. “pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola

³ Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*”, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449>, 18 januari 2016.

⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 47.

serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah”.⁵ Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain.⁶ Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, maupun disadari atau tidak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan masalah pendidikan kedaerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaanya kepada sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.⁷

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keadilan berarti besarnya biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah masing-masing. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran dengan hasil, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan serta hasil. Akuntabilitas publik yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. Transparansi artinya adanya ketebukaan dalam pengelolaan biaya pendidikan yaitu keterbukaan sumber pendapatan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengetahuinya.

Dalam Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas. Mulai dari

⁵ *Ibid.*, h. 49.

⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), h. 1.

⁷ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h.

tahap perencanaan, penggunaan biaya pendidikan, pengawasan serta pertanggungjawaban atas penggunaan biaya pendidikan. Sehingga, dapat membantu mengurangi permasalahan-permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi di lembaga pendidikan sekolah. Dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan baik.

KAJIAN TEORITIK

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Mulyono juga menjelaskan bahwa biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan siswa.⁸

Menurut Nanang Fattah pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.⁹

Menurut Mulyono, pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (*revenue*), dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Pasal 62 terdiri dari tiga bagian besar yaitu:

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

⁸ Tarmizi, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie" , <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449>, 18 januari 2016.

⁹ *Ibid.*, h. 94.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 95.

Definisi biaya menurut supriyono adalah biaya pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk unag barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).¹¹

Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya, seperti yang dikemukakan oleh thomash jhon yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Hal itu merupakan administrasi/manajemen lembaga pendidikan. Selanjutnya, beliau menjelaskan tiga hal penting, yaitu ilmu ekonomi yang terkait dengan alokasi dan pembiayaan yang terkait dengan distribusi, tetapi yang ketiga terkait dengan manajemen yang di dalamnya mencakup fungsi dari komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian ada perbedaan penekanan antara ekonomi pendidikan dan pembiayaan pendidikan.¹²

Menurut Levin pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.¹³

Inti dari manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan atau sekolah adalah menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan secara jujur, dan mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Bila ini benar-benar diterapkan, manajemen keuangan akan membantu kemajuan lembaga pendidikan atau sekolah.¹⁴

Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, untuk membiayai seluruh

¹¹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), h. 3.

¹² Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 3

¹³ Rida Fironika, *Jurnal Volume 02, Nomor 01 Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755/632>, 18 januari 2016.

¹⁴ Aminatul Zahroh, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 157.

aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sehingga tercapainya mutu pendidikan mutu pendidikan yang diharapkan.

1. Jenis-jenis Pembiayaan

Kemampuan mengelola pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Dengan kata lain hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier. Pendapat seperti tentu masih harus dibuktikan secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat sosial ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu biaya langsung dan tidak langsung.

Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.¹⁵

Menurut Nanang Fattah “biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, saran belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earing Forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opurtinity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.¹⁶

a. Biaya Langsung Pendidikan

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Biaya

¹⁵ Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), h. 23.

¹⁶ Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*” ,....h. 97.

langsung lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data sekolah pun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. Biaya langsung terwujud dalam bentuk pengeluaran unag secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PBM pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku bahan perlengkapan, dan biaya perawatan pendidikan.

b. Biaya tidak langsung pendidikan

Biaya tidak langsung (*indirect cost*) berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaraan pendidikannya. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa belajar. Biaya tidak langsung harus memperhitungkan juga biaya yang hilang ketika anak belajar. Pendapatan peserta didik hilang karena sedang mengikuti pendidikan, begitu juga dengan biaya-biaya pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh peserta didik maupun keluarganya.

Terbatasnya sumber-sumber yang dimiliki, khususnya sumber daya finansial, mendorong dilakukannya upaya perhitungan secara cermat program secara tepat, serta penentuan skapa prioritas, hal tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pada dasarnya merupakan implementasi program dan kegiatan yang diterjemahkan kedalam aspek-aspek yang diperlukan, seperti ketenagaan, waktu, alat sarana prasarana lain yang mengandung konsekuensi perhitungan biaya.¹⁷

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip

¹⁷ Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*,.....h. 23.

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁸ Disamping itu, efektifitas, juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

a. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui sejumlah uang dan penggunaannya yang diterima sekolah dari orang tua siswa. Perolehan informasi ini manambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.¹⁹

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti

¹⁸ Yul Koerudin, *Tesis Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Ma'arif 01 Kabupaten Banyumas*, (IAIN Purwakerto, 2015), h. 55.

¹⁹Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*,.....h. 23.

penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- 2) Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.²⁰

c. Efektifitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektifitas lebih dalam lagi, kaena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. “*Effectiveness characterized by qualitative outcomes*”. Efektifitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Garner menyebutkan “*Efficiency characterized by quantitative outputs*. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau

²⁰ *Ibid.*, h. 56.

antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan.

- 2) Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.²¹

3. Sumber – sumber Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan diperoleh dan dipergunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. sama halnya Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), pada umumnya sekolah swasta memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orang tua murid.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 47 Tentang Sumber Pendanaan Pendidikan yaitu: ayat (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²²

1) Pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Pusat

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim,

²¹ *Ibid.*, h. 58.

²² Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 163.

terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari orang tua atau berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya. Hal ini ditempuh karena anggaran untuk pengembangan sekolah dirasakan kurang memadai, untuk menutupi kebutuhan sekolah. Kebijakan di daerah-daerah juga masih kurang merespons sepenuhnya kebijakan nasional dalam pendidikan, ditambah kondisi sebagian daerah lagi sumber dana alamnya tidak mendukung atau karena kemampuan keuangan APBD tidak mendukung terhadap perkembangan pembangunan daerahnya sendiri dan juga diakibatkan faktor-faktor lainnya.

Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Disamping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah bersangkutan.²³

Supriadi menjelaskan pada tahun 200/2001, sebagian besar sumber dana pendidikan sekolah negeri berasal dari pemerintah sebesar 83,38% sedangkan dana dari pihak lain dalam bentuk iuran yang dikelola oleh BP3 hanya 12,48% dan dana lainnya dari masyarakat yang dikelola oleh sekolah adalah 1,14%.

Seiring dengan dimulainya era otonomi, pemerintah pusat memandang hubungan antar pusat dan daerah tidak dalam kerangka hierarkis, tetapi konsultatif. Dengan tujuan memberdayakan daerah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan dalam

²³ Susiana, *Tesis Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al-Jihad Medan Sunggal*, (Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2016), h. 29.

model *black grant*, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana APBN untuk pembangunan sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (Depdiknas). Dalam rangka memberdayakan SD samapai SLTA, manajemen Pengelolaan diserahkan ke kabupaten/kota dan provinsi.²⁴

Undang-undang menyebutkan bahwa biaya pendidikan harua 20% dari APBN. Namun, kenyataannya yang ada selam tahun 2005 ini, anggaran pendidikan yang disetujui hanya 8% dari APBN atau sekitar Rp 3,1 triliun. Ini berarti pemerintah sepakat bahwa presentase biaya pendidikan akan dipenuhi lima tahun kedepan. Padahal, tanpa bantuan pemerintah, biaya pendidikan membebani masyarakat, sehingga amanat UUD bahwa setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan hanya menjadi sebuah amanat, karena masyarkat tak mampu terpaksa tidak bersekolah.²⁵

2) Pembiayaan Pendidikan dari Orang Tua Siswa

Matin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain:

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiyai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah/madrasah swasta.

2. Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBP3)

BP3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah/madrasah.

3. Sumbangan Lain-lain

Selain kedua jenis biaya diatas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat incidental, baik berupa uang maupun barang misalnya biaya

²⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*,..... h. 164.

²⁵ *Ibid.*, h. 164.

praktikum, keterampilan, kegiatan ekstra kurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, peralatan pelajaran dan lain-lain.²⁶

3) Sumbangan Dari Pihak Lain

Matin menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain diluar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah berupa pinjaman (*loan*) dan hibah (*grant*) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri yang digunakan untuk membantuk menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di indonesia khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2012 tentang pengutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 12 ayat (1) masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar, (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan, (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada dilembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga

²⁶ Susiana, *Tesis Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al-Jihad Medan Sunggal*,..... h. 30.

²⁷ *Ibid.*, h. 31.

pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya.²⁸

Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.²⁹

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing.³⁰

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (Budgeting)

Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jamaluddin menyatakan “anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari uang dalam bentuk angka-angka dari uang untuk jangka waktu tertentu”. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Fungsi anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.³¹

Harjanto menyebutkan bahwa perencanaan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah, sekolah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang dalam perencanaan pembiayaan sekolah sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa bahwa perencanaan pembiayaan sekolah

²⁸ *Ibid*, hal. 157.

²⁹ Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 25.

³⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 257.

³¹ Teguh Eko Atmaja, *Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMANegeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya*. (Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2016), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2613/2467>, h. 122.

sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).³²

Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:³³

1. Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
2. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
3. Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Menurut Nanang Fattah Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran.
 - 1) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
 - 2) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial.
 - 3) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.

³² Susilawaty, *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah*, SD Negeri 4 Kota Banda Aceh, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2466/2319>, 18 Januari 2016.

³³ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 54.

³⁴ *Ibid*, h. 55.

- 4) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- 5) Melakukan revisi usulan anggaran.
- 6) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- 7) Pengesahan anggaran.

b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:³⁵

1. Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

2. Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah

Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM.

3. Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

2. Akuntansi (*Accounting*)

³⁵ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 20.

Kata Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris *to account* yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengavaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

- a. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
- b. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah dan sebagainya.

Definisi dari sudut pandang proses kegiatan apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai “proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. Pada dasarnya, akuntansi harus:

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- b. Memroses atau menganalisis data yang relevan.
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.³⁶

Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.

- a. Kepala sekolah

Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah menentukan peralatan apa sebaiknya dibeli,

³⁶ Indra Bastian, *Op.cit.*, h. 56.

berapa persediaan ATK yang harus ada dibagian perlengkapan, dan lain-lain.

b. Guru dan Karyawan

Guru dan karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah).

c. Kreditor atau pemberi pinjaman

Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor).

d. Orang tua siswa

Para orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan.

e. Pemasok

Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

f. Pemerintah

Pemrintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

g. Masyarakat

Institusi pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan keuangan institusi pendidikan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecendrungan dan perkembangan terakhir pengelolaan keuangan institusi pendidikan serta rangkaian aktivitasnya.

1) Akuntansi untuk Badan Hukum Pendidikan Dasar Dan Menengah (BHPDM)

Tujuan penyelenggaraan akuntansi dalam Badan Hukum Pendidikan Dasar Dan Menengah (BHPDM) adalah untuk menyediakan gambaran tentang keadaan keuangan pada lembaga pendidikan.

Menurut Bastian ada 3 anggaran publik dalam anggaran pendidikan yang harus kita perhatikan, yaitu:

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikelola oleh pemerintah.
- b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- c. APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang dikelola oleh sekolah.

Anggaran-anggaran itulah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, masyarakat harus mengetahui penggunaan/alokasi dana-dana tersebut.³⁷

2) Siklus Akuntansi dalam BHPDM

Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Membuat atau menerima bukti pencatatan dimana biasanya sebuah entitas mempunyai *form voucher* (bukti pencatatan) sendiri atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya.
- b. Mencatat dalam buku jurnal
- c. Memindahkan data jurnal ke buku besar
- d. Menyusun laporan keuangan.

Siklus akuntansi dalam BHPDM dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu:³⁸

Tabel siklus akuntansi dalam BHPDM

No	Tahapan	Kegiatan
1	Pencatatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. 2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. 3. Memindahbukukan (<i>posting</i>) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar
2	Pengiktisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan neraca saldo (<i>trial balance</i>)

³⁷ *Ibid*, h. 91.

³⁸ *Ibid*, h. 94.

		<p>berdasarkan akun-akun buku besar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian (<i>adjusting entries</i>) 3. Penyusunan kertas kerja (<i>work sheet</i>) atau neraca lajur. 4. Pembuatan ayat jurnal penutup (<i>closing entries</i>) 5. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan (<i>post closing trial balance</i>). 6. Pembuatan ayat jurnal pembalik (<i>reversing entries</i>).
3	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan surplus defisit 2. Laporan arus kas 3. Neraca 4. Catatan atas laporan keuangan

3. Evaluasi (*Controlling*)

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.

Evaluasi merupakan tahap terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Nanang Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat criteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk:

- a. Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.

- c. Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpanan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.³⁹

Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah. Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

Fungsi evaluasi pada masing-masing tahap berbeda satu sama lainnya. Evaluasi sering dilihat sebagai upaya pencegahan. Ia bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid, namun ia memiliki kekurangan yang mendasar.

Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain:⁴⁰

No	Komponen	Apek	Jenis Dokumen SNP
1	Biaya investasi	Penyusunan RAPBS	Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah
		Sarana dan prasaran	Dokumen catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh
		Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan	Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP

³⁹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 101.

⁴⁰ Kementrian Pendidikan Nasional, *Instrument Dokumen Portofolio*, (Jakarta, 2010).

		Modal Kerja	Dokumen modal kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
2	Biaya Operasional	Gaji Pendidik	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
		Gaji tenaga kependidikan	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
		Kegiatan pembelajaran	Dokumen pengalokasian biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
		Kegiatan kesiswaan	Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP
		ATK	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP
		Bahan habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
		Alat habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
		Kegiatan rapat	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat
		Transport dan perjalanan dinas	Dokumen pengeluaran biaya transport dan perjalanan dinas
		Penggandaan soal-soal ujian	Dokumen pengeluaran biaya penggandaan soal ujian
3	Biaya Operasional	Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung	Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
		Sumbangan pendidikan	Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan
		Uang sekolah	Dokumen pemungutan atau

			sumbangan uang sekolah
		Subsidi silang	Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		Biaya operasional lain	Dokumen penggalangan biaya operasional lain disamping iuran komite rutin dan fisik sekolah
		Penetapan biaya operasional	Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak
		Pengelolaan biaya operasional	Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat
4	Transparansi dan akuntabilitas	Pedoman pengelolaan keuangan	Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS)
		Pembukuan biaya operasional	Dokumen pembukuan biaya operasional
		Laporan pertanggung jawaban	Dokumen laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatul Zahroh, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009)
- Bidayatun Ni'mah, *Skripsi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta: Depdiknas, 2001)
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Henry L. Sisk, *Prinsiples Of Manajegement* (Brighton England: South-Western Publishing Company, 1969)
- Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Instrument Dokumen Portofolio*, (Jakarta, 2010).

- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010)
- Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rida Fironika, *Jurnal Volume 02, Nomor 01 Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755/632>, 18 januari 2016.
- Rida Fironika, *Jurnal Volume 02, Nomor 01 Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755/632>, 18 januari 2016
- Rida Fironika, *Jurnal Volume 02, Nomor 01 Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pendas/article/view/755/632>, 18 januari 2016
- Salis Edward, *Total Quality Management in Education*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2006),
- Susiana, *Tesis Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al-Jihad Medan Sunggal*, (Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2016)
- Susiana, *Tesis Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta MIS Al-Jihad Medan Sunggal*
- Susilawaty, *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah*, SD Negeri 4 Kota Banda Aceh, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2466/2319>, 18 Januari 2016.
- T Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003)
- Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*” , [,http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449), 18 januari 2016.
- Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*” , [,http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449), 18 januari 2016.
- Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*”
- Teguh Eko Atmaja, *Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMANegeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya*. (Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2016), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2613/2467>
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan No. 20 tahun 2003 *tentang sistem pendidikan Nasional*, (Jakarta: DEPAG, 2006)
Yul Koerudin, *Tesis Sistem Pembiayaan Pendidikan MI Ma'arif 01 Kabupaten Banyumas*, (IAIN Purwakerto)